

PEMUDA BERSUARA “POTRET KEBIJAKAN PPKM (JAWA-BALI) SOLUSI ATAU PROBLEMATIKA PUBLIK?

Andreas Alan Kusuma^{1,*}, Jumiati KN²

¹Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

²Ilmu Komunikasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*E-mail : Andreanalankusuma12@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi pada saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan dalam penanggulangan Covid-19 melalui berbagai regulasi yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Diantara regulasi tersebut salah satunya adalah PPKM yang menuai banyak sekali komentar yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Mitra KKN dalam hal ini merupakan lembaga non pemerintah yang bekerja dalam sektor riset dan advokasi kebijakan. Dalam hal ini mitra memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan dukungan terhadap program yang kami laksanakan yang mengacu kepada advokasi kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam program ini adalah melalui media zoom meeting berbasis online, program yang dilaksanakan adalah webinar diskusi publik dengan mengacu pada pendapat kaum pemuda dalam memberikan argumentasi serta sebagai landasan dalam sektor pengawasan dan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Kata kunci: Potret, Kebijakan, PPKM, Problematika, Solusi

ABSTRACT

The current condition is that the Indonesian government is trying to deal with Covid-19 through various regulations that have been set and enforced by the government. Among these regulations, one of them is PPKM which reaps a lot of comments made by various levels of society. The KKN partners in this case are non-governmental organizations that work in the research sector and policy advocacy. In this case, partners have a role as institutions that provide support for the programs we carry out which refer to policy advocacy and implementation of government policies. The implementation method used in this program is through online-based zoom meeting media, the program implemented is a public discussion webinar with reference to the opinions of youth in providing arguments and as a basis in the supervision and advocacy sector carried out by the community related to the implementation of policies carried out by the community. government, especially in dealing with Covid-19 in Indonesia.

Keywords: Portraits, Policies, PPKM, Problems, Solutions

1. PENDAHULUAN

PATTIRO (Pusat Telaah dan Kajian Regional) sebuah organisasi riset dan advokasi yang resmi berdiri pada 17 April 1999 dan telah bekerja di lebih dari 17 provinsi dan 70 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selama ini, PATTIRO memusatkan perhatiannya pada isu tata kelola pemerintahan daerah, terutama isu desentralisasi. Melalui kerja-kerjanya, PATTIRO aktif mendorong terciptanya tata kelola pemerintah daerah yang baik, transparan, dan adil demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Selain aktif melakukan penelitian, PATTIRO kerap memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah. Di samping itu, PATTIRO juga membantu masyarakat dalam melakukan advokasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mereformasi kebijakan, memperbaiki pelayanan publik dan pengelolaan anggaran publik.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Penetapan tersebut

didasarkan pada sebaran 118 ribu kasus yang menjangkiti di 114 negara. Sebelumnya COVID-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, RRT pada akhir desember 2019, dan kemudian menjadi wabah di januari 2020. Gejala dari COVID-19 ini, sangat mirip dengan gejala flu disertai dengan pneumonia (radang paru), yang mengakibatkan pasien menjadi sesak (sulit bernafas). Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat virus ini. Data dari Johns Hopkins School merilis lebih dari 3.754.650 kasus positif COVID-19 secara global dengan 1.246.184 kasus dinyatakan pulih dari virus dan 263.861 kasus meninggal dunia. Update terbaru pada 2 Agustus 2021 berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 198.969.742 kasus. Di Indonesia informasi terkini terkait kasus Covid-19 berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sebanyak 35.867 kasus baru dalam kurun waktu 24 jam di hari Rabu (4/8/2021). Penambahan jumlah kasus tersebut dapat diakumulasikan dengan data per 2 Maret 2020, dengan total mencapai 3.532.567 orang. Pada periode 3-4 Agustus 2021, terdapat 1.747 pasien Covid-19 yang tutup usia Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 100.636 orang sejak awal pandemi. Dengan melonjaknya angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah indonesia telah mengupayakan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah dengan memberlakukan berbagai regulasi atau kebijakan, yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan serta mengupayakan dalam meminimalisir dampak penyebaran dari Covid-19. Adapun kebijakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah antara lain adalah PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat (Jawa-Bali).

Setelah ditetapkannya berbagai kebijakan tersebut, hingga pada saat ini yaitu pemberlakuannya kebijakan PPKM Darurat yang telah menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius terhadap lapisan masyarakat. Dengan diberlakukannya kebijakan PPKM Darurat tersebut telah menuai pendapat publik baik yang mendukung maupun yang menolak terkait kebijakan tersebut. Adapun kelompok yang

menolak merupakan kelompok dari berbagai lapisan, diantaranya adalah para pengusaha kecil, korban PHK secara massal, serta pendapatan masyarakat yang relatif menengah kebawah. Dari berbagai lapisan masyarakat tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan PPKM telah memberikan dampak yang kurang mendukung terhadap kelompok masyarakat at dengan kategori tersebut.

Oleh karena itu, program KKN yang diselenggarakan oleh kelompok sub 18 adalah kegiatan webinar dengan fokus terhadap diskusi publik yang bertemakan pemuda bersuara dengan pembahasan mengenai potret kebijakan PPKM. Sebagaimana yang kita tau kaum pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan dapat menjadi agent of change (Dewanta dan Syaifullah, 2008: 46). Pemuda juga sekelompok masyarakat yang merupakan salah satu pengawas eksternal segala bentuk penyelenggaraan kebijakan. Hal ini merujuk Pada pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, bahwa pengawasan Eksternal dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemuda sebagai masyarakat yang memiliki fungsi agent of control seyogyanya juga menunjukkan eksistensinya dalam pengawasan kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain kaum pemuda, dalam diskusi tersebut juga mengundang mitra untuk turut serta dalam penyelenggaraan diskusi publik yang diprioritaskan sebagai pembicara utama.

Dengan dilaksanakannya webinar diskusi publik tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan terhadap masyarakat dan kaum pemuda mengenai kebijakan publik, serta memberikan pengetahuan mengenai sistem pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

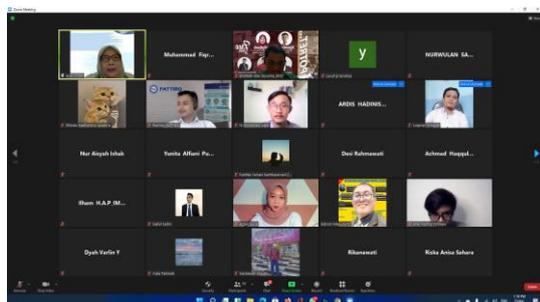
2. METODE PELAKSANAAN

Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan oleh sub kelompok 18 merupakan kegiatan yang membahas mengenai suatu implementasi kebijakan dalam upaya

meminimalisir dari penyebaran Covid-19. adapun program kegiatan yang dilaksanakan merupakan webinar diskusi publik yang turut mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten di berbagai sektor (Politik, Hukum, Kebijakan, Penganggaran). Adapun pelaksanaan webinar tersebut dilakukan secara daring (online) melalui zoom meeting. Tujuan dari diskusi publik tersebut adalah untuk memberikan edukasi, dan juga wawasan terhadap peserta dan masyarakat yang ikut dalam rangkaian kegiatan mengenai implementasi kebijakan, selain itu juga sebagai media advokasi terhadap kebijakan, serta sebagai kontrol terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sasaran atau target dari webinar diskusi publik ini adalah secara khusus kaum pemuda, dan secara umum adalah masyarakat. Pola komunikasi yang digunakan dalam mengundang dan mengajak masyarakat untuk ikut serta adalah dengan menggunakan media digital yang terdiri atas, whatsapp, Instagram, paid promote, serta media telegram. Dalam webinar tersebut juga turut mengundang pembicara yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu terdapat perwakilan dari mitra Bapak Ramlan Nugraha, ST sebagai pembicara utama dalam webinar tersebut yang berfokus pada riset dan advokasi dalam penganggaran, kemudian Dr. Izzatusolekha, S.Sos., M.Si sebagai pembicara pembuka dalam webinar tersebut. Serta mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbadan (Hukum, Politik, Administrasi Publik).

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Gambar 1. Pelaksanaan webinar diskusi publik bersama dengan mitra.

Program KKN berupa webinar diskusi publik ini diadakan pada tanggal 23 Juli

2021 tepatnya pada hari jumat jam 13.00 sampai selesai. Pelaksanaan webinar tersebut dilakukan secara daring dengan mementingkan kondisi pada saat ini. Sasaran dari pada webinar ini adalah masyarakat dari berbagai lapisan, serta khususnya adalah kaum pemuda dari berbagai jenjang pendidikan. Pelaksanaan webinar ini menitikkan pada permasalahan mengenai kebijakan PPKM yang diberlakukan dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Kondisi saat ini, Indonesia sedang mengupayakan untuk menurunkan kurva penularan dan penyebaran Covid-19, serta mengendalikan Kembali Covid-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia, dengan menetapkan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada awal penyebaran Covid-19, pemerintah telah menetapkan kebijakan PSBB, kemudian berganti dengan kebijakan PSBB TRANSISI dengan dalih akan menuju New Normal, Kebijakan Karantina wilayah, Kebijakan PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat (Jawa-Bali), namun pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut masih belum dapat dikatakan efektif dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pada penerbitan kebijakan terbaru pada saat ini dengan Julukan PPKM Darurat (Jawa-Bali) telah menimbulkan berbagai tanggapan dari lapisan masyarakat, baik berupa penolakan maupun dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Banyaknya masyarakat yang menolak dari kebijakan PPKM ini dikarenakan berbagai hal yaitu, banyaknya masyarakat yang di PHK secara massal oleh perusahaan, banyaknya masyarakat yang harus menutup lahan usahanya, pedagang kecil yang sulit dalam mendapatkan pemasukan, sehingga mengakibatkan pendapatan ekonomi masyarakat menjadi melemah. Akibat dari berlakunya kebijakan tersebut memberikan dampak serius terhadap masyarakat yang dapat memunculkan kesenjangan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, serta tingginya angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu pada pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta mengambil kegiatan berupa Webinar dengan topik Pemuda Bersuara. Topik pemuda bersuara tersebut diambil dengan latar

belakang untuk menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat sekaligus menampilkan berbagai macam argumentatif dari kaum pemuda terhadap kebijakan dengan tujuan dapat ikut berkontribusi dalam membangun kebijakan yang lebih masif dalam menangani Covid-19 di Indonesia, dan upaya untuk memberi control pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku, serta memberikan wawasan kepada masyarakat terkait kebijakan. Dengan latar belakang tersebut maka kami memberikan fokus diskusi dengan tema “Pemuda Bersuara : Potret Kebijakan PPKM Darurat (Jawa-Bali : Solusi atau Problematika Publik?”. Dalam pelaksanaan kegiatan diskusi publik tersebut didukung dengan berbagai narasumber yang berkompeten dalam setiap bidang. Adapun narasumber tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dr. Izzatusolekha, S.Sos., M.Si. (Kaprodin Administrasi Publik FISIP UMJ), sebagai open speech dan sekaligus pembuka dalam kegiatan diskusi publik.
2. Ramlan Nugraha, ST. (Pegiat PATTIRO), sebagai keynote speaker atau pembicara utama
3. dalam kegiatan diskusi ini. Adapun materi yang dibawakan adalah terkait dengan perspektif dalam penganggaran di kebijakan PPKM.
4. Saiful Salim, S. H. Selaku Ketua Umum DPN PERMAHI, sebagai narasumber dari kaum pemuda berdasarkan perspektif Hukum.
5. Nur Muhammad Iqbal, S.Ap (Pimpinan Cabang IMM Tangerang-Banten), sebagai narasumber dari kaum pemuda berdasarkan perspektif administrasi publik atau pengamatan kebijakan.
6. Asyraf Al Faruqi (Ketua Umum IMM FISIP UMJ, Mahasiswa Ilmu Politik), sebagai narasumber kaum pemuda berdasarkan perspektif Politik dan Muhammadiyah.

Dari keseluruhan narasumber telah memaparkan pandangan perspektif mereka terhadap Potret kebijakan PPKM (Jawa-Bali) ini. Kebijakan PPKM (Jawa-Bali) merupakan kebijakan yang dikeluarkan. Oleh pemerintah melalui Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease

2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Inovasi yang didapat dari penyelenggaraan program webinar ini adalah berupa non fisik atau tidak berupa barang ataupun benda, melainkan sebuah materi yang dipaparkan oleh pemateri, ilmu dan wawasan baru mengenai kebijakan, serta memberikan pandangan kepada peserta diskusi mengenai pentingnya sektor pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Adapun hasil diskusi yang telah dilakukan memberikan berbagai ragam narasi dan juga pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan PPKM tersebut masih belum optimal dalam implementasinya, sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa kebijakan PPKM ini memiliki berbagai kekurangan dalam implementasinya. Kebijakan PPKM ini juga didukung dengan adanya dana bantuan sosial yang seharusnya dapat direalisasikan secara masif dan menyeluruh. Penyerapan dana bansos tersebut belum dikatakan optimal karena realisasi penyerapan anggaran pada dana bantuan sosial tersebut dalam APBD Kab/Kota pada tahun 2021 masih di bawah 30%. Berikut grafik Realisasi Bansos dan BTT di Prov dan Kab/Kota rata-rata mencapai 29,13% dan 26,96. Realisasi di tingkat Kabupaten merupakan yang terendah yaitu BTT: 24,8% dan Bansos: 19,92%.



Gambar 2. Grafik Realisasi Penyerapan Anggaran Bansos dan BTT Kab/Kota.

Kemudian selain dalam penyerapan anggaran yang kurang maksimal, faktor lainnya juga yang menjadi problematika dalam implementasi kebijakan PPKM adalah arah dan tujuan dalam kebijakan tersebut

masih kurang terukur dan belum berfokus dalam satu masalah. Kebijakan PPKM ini memberikan dampak yang cukup serius terhadap masyarakat, diantaranya adalah dalam sektor Pendidikan yang belum memadai dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Masih banyak terdapat kendala terutama pada daerah-daerah terpencil yang sulit dengan akses internet di daerah tersebut, sehingga membuat ketidak efektifan kegiatan belajar secara daring. Kemudian jika dilihat dari gambaran hukum, seharusnya pemerintah harus lebih fokus terhadap satu kebijakan saja dan tidak membuat kebijakan dengan namabaru, karena masyarakat cenderung sudah membangun paradigmanya sendiri mengenai hal tersebut. Banyak masyarakat yang sudah mengeluh akan kebijakan yang terus berganti nama. Oleh karena itu penyelenggaraan kebijakan PPKM ini sebenarnya baik dalam melakukan penekanan terhadap curva penurunan Covid-19, akan tetapi dari segi pelaksanaan pemerintah dapat dikatakan belum mencapai keoptimalanya dalam memberlakukan kebijakan tersebut. Kemudian lebih baik menggunakan satu kebijakan dengan kebijakan yang ada sebelumnya dan lebih mengoptimalkan Kembali, dari pada selalu mengganti nama kebijakan yang membuat berbagai lapisan masyarakat mengalami pro dan kontra.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Dr. Tri Yuni Hendrawati, M.Si, IPM, ASEAN selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
2. Dr. Lusi Andriyani, SIP., M.Si. selaku Ketua Kuliah Kerja Nyata 2021
3. Dr. Okta Rosfiani, S.Hut., M.Pd Dosen Pembimbing Lapangan
4. Bapak Bejo Untung selaku Direktur Eksekutif PATTIRO
5. Ibu Fitria Muslih selaku Mentor Pemegang Pattiro
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan yang tak henti-hentinya
7. Teman-teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya kelompok Delapan belas, semoga

kebersamaan dan kekompakan kita selalu terjaga selamanya.

8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Berbasis Online ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., dan Yasin, M., 1974, Pemuda dan Perubahan Sosial, Jakarta:LP3ES
- Dewanta, P., dan Syaifullah, C., 2008. Rekonstruksi Pemuda. Jakarta. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Raharjo, 2020. Penguatan Civic Literacy dalam Pembentukan Good Citizen (Studi tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokrata). Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23 No. 2
- UNESCO. Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi. Paris: UNESCO, 2003.
- Riza, Jawahir Gustav. 2021. UPDATE Corona Dunia 2 Agustus: 198 Juta Kasus Covid-19 | 4,2 Juta Orang Meninggal Dunia. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/02/095200165/update-corona-dunia-2-agustus--198-juta-kasus-covid-19-4-2-juta-orang?page=all> (diakses pada 4 Juli 2021).
- Guritno, Tatang. 2021. Update: Kasus Covid-19 Bertambah 35.867 Orang, Angka Kematian Lewati 100.000. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/04/17040811/update-kasus-covid-19-bertambah-35867-orang-angka-kematian-lewati-100000?page=all> (diakses pada 4 Juli 2021).
- Koderi, Muhammad. 2018. Sejarah Berdirinya PCM Pasar Minggu. <https://pantiyatimkhadijah.wordpress.com/2018/09/05/sejarah-berdirinya-pcm-pasar-minggu/> (diakses pada 3 Juli 2021)
- Nadilla, Zebua, Winda Dwi Astuti. 2020. Edukasi Tindakan Pencegahan Covid-19 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru melalui Webinar (Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat). 101 - UMJ – SH.

